

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kohar, 2000, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anistitus Amanat, 2003*Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- AP. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung : CV.Mandar Maju.
- Audi C, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Indah.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fulthoni, Arianingtyas R, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta: ILRC.
- Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta : Genta.
- Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- J. Kartini Soejendro, 2005, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Jogjakarta : Kanisius.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal research methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, Cet. 8.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepbulish, Ed. 1, Cet. 1.

Tito Edy Priandono, 2014, *Komunikasi Dalam Keberagaman*, Bandung : Remaja Rosdakarya, Ed. 1

B. Jurnal dan Internet

Annis Setiawan, “Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum”, *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol. 1 No. 1, <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/jurtama/article/view/803/510>

Darmiawati, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Universitas Islam Indragiri*, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1325>

Firdatul Laili, “Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/861>

Fitika Andriani, “Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan”, *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, pp. 109-125, 2012, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1129/913>

Fitreni Chris Lilu, “Pengaturan Mengenai Bukti Keterangan Hak Waris Yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia”, Tesis Universitas Sumatra Utara, Meda, 2007, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35947>

Irma Garwan, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2021, <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/1648/1267>

Maslan Abdin “Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural”, *Jurnal Pattimura Civic*, Vol 1, 2020, No. 1, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpc/article/view/1681>

Michael Hartono, “Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 34, 2019, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/198>

- Ni Ketut Novita Sari, Sihabudin, Bambang Sutjito, “Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*,
- Pramana, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, <https://docplayer.info/122314130-Kepastian-hukum-surat-keterangan-waris-sebagai-persyaratan-pengambilan-jaminan-kredit.html>
- Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum, Ana Silviana, Budi Ispriyarso., “Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Notarius*. Vol 14 No. 1, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39033>
- Richard Cisanto, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. III, No. 2, 2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7842>
- Satria Braja Hariadja, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Objek Yang Sama”, *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol 18 No. 3, <https://www.neliti.com/publications/150280/kekuatan-akta-di-bawah-tangan-sebagai-alat-bukti-di-pengadilan>
- Hasil Sensus Penduduk 2020, Diakses tanggal 29 Agustus 2021, Melalui Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Wilayah kerja Balai Harta Peninggalan, diakses tanggal 6 Agustus 2022, Melalui <https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-singkat>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 23 Agustus 2022, Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lokakarya>

C. Perturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 mengenai Badan Pertanahan Nasional.

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69

International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Indische Staatsregeling (IS)